



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/331/2025**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2025**

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen risiko, dan system pengendalian internal yang baik dan memadai, maka diperlukan adanya penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perencanaan program kerja yang sistematis dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan Pengawasan
 - d. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
 - e. Program, Kegiatan dan Anggaran
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 20
Februari 2025.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 20 Februari 2025

WALIKOTA TEBING TINGGI



IMAN INDIAN SARAGIH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 100.3.3.3/331/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025

**PENJELASAN TEKNIS
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKP2T)
BERBASIS RISIKO
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

Indikator keberhasilan pembinaan dan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah, yaitu semakin menurunnya penyimpangan, temuan dan rekomendasi hasil audit, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Pembinaan dan Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak mencari temuan semata, tetapi lebih diarahkan dalam rangka membina dan memberi peringatan dini indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning*).

Perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka menengah dan jangka Panjang. Penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan dipengaruhi oleh prioritas, fokus dan sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, dan jadwal waktu pengawasan. Sehubungan dengan itu perlu menggunakan perencanaan audit berbasis risiko, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien serta diminimalisir perubahan program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yang sedang berjalan.

Penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan berbasis risiko dilaksanakan dengan tahapan sistematis, pemilihan *auditable unit* dan berbagai masukan dari *stakeholders* di internal Inspektorat Kota Tebing Tinggi.

Informasi yang dimuat dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan meliputi :

1. Jenis pembinaan dan pengawasan (Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring/ Pengawasan lainnya);
2. Obyek pembinaan dan pengawasan/ Auditan (Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang menjadi Obyek Audit);
3. Tingkat Risiko;
4. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengawasan;
5. Jumlah hari pemeriksaan dan waktu penugasan;
6. Anggaran biaya;

7. Perkiraan tanggal penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan dan Jumlah Hari Pengawasan;
8. Inspektur Pembantu yang melaksanakan/ mengkoordinir pelaksanaan/ Tim; dan
9. Sarana penunjang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Tahun Anggaran 2025 agar pelaksanaan lebih berdaya guna, efisien, efektif, dan berkualitas, serta untuk menghindari terjadinya *overlapping* pelaksanaan pengawasan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksaan Eksternal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, dan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2024 dan Penyusunan PKP2T Tahun 2025 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi menyusun Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan untuk tahun 2025 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman;
2. Mengarahkan pimpinan dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian area-area berisiko;
3. Justifikasi terhadap sumberdaya audit;
4. Membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama;
5. Memberikan dasar untuk mengukur capaian kinerja; dan
6. Memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit.

C. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, khususnya tujuan ke 4, yaitu **“Pengoptimalan Reformasi Birokrasi”**, dengan sasaran ke-9 yaitu **“Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”**. Adapun kegiatan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

- I. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan :

a. Kegiatan *assurance* meliputi :

1. Audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/ area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi :
 - a) Audit operasional;
 - b) Audit dengan tujuan tertentu, meliputi :
 - 1) Audit Probitiy; dan
 - 2) Audit tematik lain sesuai isu-isu strategis.
 - c) Audit investigasi
2. Audit kinerja memastikan aspek efisiensi, efektifitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/ program/ kegiatan;
3. *Assurance* atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata Kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi :
 - a) Reviu :
 - 1) Tata Kelola Barang Milik Daerah;
 - 2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
 - 3) Tata Kelola Perizinan;
 - 4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;
 - 5) Rencana tindak pengendalian perangkat daerah tahun 2024;
 - 6) Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP);
 - 7) Dokumen perencanaan daerah (reviu rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahun 2024, reviu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025, reviu rencana kerja perubahan tahun 2024, dan reviu dokumen rencana kerja tahun 2024);
 - 8) Dokumen anggaran daerah (reviu KUPA-PPAS Tahun 2024, Reviu KUA-PPAS Tahun 2025, Reviu RKA P-APBD TA. 2024, dan Reviu RKA APBD TA. 2025;
 - 9) Dokumen penatausahaan keuangan daerah (dana alokasi khusus dan dana alokasi khusus/ non fisik, reviu penyerapan anggaran, reviu serapan pengadaan barang dan jasa, Reviu P3DN;
 - 10) Dokumen laporan keuangan daerah (reviu LKPD TA. 2023);
 - 11) Standar Satuan Harga/ Analisis Satuan Belanja (SSH/ASB); dan
 - b) Monitoring/ evaluasi/ pemantauan:
 - 1) Pengendalian Gratifikasi;

- 2) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah;
- 3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 4) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 6) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- 7) Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah;
- 8) Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah;
- 9) Pengendalian Benturan Kepentingan;
- 10) Pengadaan Barang/Jasa;
- 11) Pelaksanaan *whistle blowing system* (WBS); dan
- 12) Pelaksanaan pengawasan program terkait isu strategis pemerintah daerah.
- 13) *Monitoring Centre for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK).

4. *Assurance* lainnya :

- a) Monitoring/ evaluasi/ pemantauan :
 - 1) Pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN;
 - 2) Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - b) Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI);
 - c) Survei Penilaian Integritas (SPI);
 - d) Fasilitasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e) Fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah.
- b. Kegiatan konsultasi berupa bantuan kepada perangkat daerah/unit kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui Bersama oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan perangkat daerah/ unit kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi :
1. Layanan Konsultasi;
 2. Pendampingan;
 3. Sosialisasi;
 4. Bimbingan Teknis; dan
 5. *Coaching Clinic*.
- c. Kegiatan peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) :
1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi;

2. Penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Evaluasi program dan kegiatan internal;
4. Evaluasi regulasi pengawasan (Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Dan Keputusan Inspektur);
5. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
6. Pendidikan berjenjang jabatan fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan (P2UPD) di daerah;
7. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
8. Pelatihan kantor sendiri (PKS); dan
9. Telaah sejawat (*Peer Review*).

II. Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan

Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, antara lain :

A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti :

1. Pengendalian Inflasi;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pelayanan Publik;
4. Penanganan *Stunting*; dan
5. Swasembada Pangan.

Pelaksanaan Pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

1. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
2. Pemeriksaan kinerja.

B. Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui *pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP)*

No.	Area Intervensi	Topik	Sasaran	Fokus
1.	Perencanaan	Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran	Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD	1. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran 2. Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD 3. Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran 4. Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima 5. Manfaat per program/ kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan daerah
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Keuangan	1. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup : a. Kelengkapan surat permohonan dan proposal; b. Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan; c. Adanya Pakta Integritas;

				d. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah; e. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Hibah	1. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Pemendagri nomor 77 Tahun 2020; 2. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup : a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal; b. Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah; c. Pakta Integritas; d. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif;
		Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada penyaluran Bantuan Sosial	1. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomora 77 Tahun 2020; 2. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup :

				a. Dilengkapi surat permohonan dan proposal; b. Diberikan kepada organisasi diakui; c. Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama; d. Pakta Integritas; e. Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah; f. Tidak menerima bantuan lain; g. Bukan pendamping sosial PKH; h. Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.
2.	Penganggaran	Reviu Standar Harga Satuan	Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga	1. Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan; 2. Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst); 3. Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini;

				4. Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dngan anggaran pemerintah daerah; 5. Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan; 6. Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan; 7. Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan daerah.
		Reviu Analisis Standar Biaya	Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah	1. Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya; 2. Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 3. Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis; 4. Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan; 5. Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan; 6. Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan daerah.

		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran	1. Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja; 2. Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi; 3. Kesesuaian rincian sumber dana RKA; 4. Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja; 5. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan; 6. Kepatuhan penerapan standar biaya; 7. Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi; 8. Alokasi anggaran honorarium tim; 9. Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman.
		Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas	Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara.	a. Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas; b. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku. c. Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas; d. Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran

			Catatan : Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 perangkat daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.	honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku; e. Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya masing-masing pemerintah daerah.
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis daerah).	Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan : a. Perencanaan 1) Identifikasi kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/ desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana);

			Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria : a. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi; b. Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah.	2) Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait); 3) Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender); 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna); 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/penganggaran; perkiraan harga wajar). b. Persiapan 1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan; 2) Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan); 3) Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan);
--	--	--	--	---

				4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding); 5) Rancangan kontrak ketentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga. c. Pemilihan Penyedia 1) Pelaksanaan e-audit; 2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka 3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang; 4) Kendala dan addendum pemilihan (jika ada). d. Penyusunan Kontrak 1) Penetapan SPPBJ; 2) Reviu Rancangan Kontrak; 3) Substansi kontrak; 4) Penandatanganan kontrak; 5) Jaminan.
--	--	--	--	--

				e. Pelaksanaan Pekerjaan 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak; 2) Pemeriksaan lapangan; 3) Penerbitan SPMK; 4) Kesesuaian progres dan pembayaran; 5) Keadaan kahar. f. Serah Terima 1) PHO dan FHO; 2) Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan; 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA; 4) Pencatatan ke dalam aset tetap.
4.	Pelayanan Publik	Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	a. Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis); b. Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan; c. Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk

				rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis); d. Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis). e. Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayan publik sektor perizinan (termassuk rekomendaasi Teknis); f. Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA; g. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi
--	--	--	--	---

				teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan; h. Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	a. Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan; b. Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan; c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan;

				d. Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	a. Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan; b. Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan; c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan; d. Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
		Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/	a. Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan; b. Tranparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil

			gratifikasi/ pemerasan	sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan; c. Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencaatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan; d. Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
5.	Pengawasan APIP	Pengawasan Dugaan Penyimpangan	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah	Tindak lanjut terhadap hasil reviu/ audit jika terindikasi : a. Merugikan keuangan daerah; b. Penyalahgunaan kewenangan; c. Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
6.	Manajemen ASN	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN	Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN	a. Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan; b. Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai; c. Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan

				yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi); d. Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan; e. Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya.
7.	Pengelolaan BMD	Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (Fisik dan/atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain : a. Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) – jika pmda ada pengadaan tanah; b. Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh

				Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) – tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemda.
8.	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	a. Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi daerah; b. Penguatan database pajak dan retribusi daerah; c. Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi daerah; d. Upaya penagihan pajak dan retribusi daerah; e. Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak.

C. Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah antara lain :

1. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
2. Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;

4. Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
6. Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktif professional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. Struktur tata Kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<i>Quality Assurance</i> keandalan pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu : a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i>.
4.	Terselenggaranya Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (serratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait : a. Pengawas pelayanan publik; b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Pengawasan keuangan daerah/ APBD; d. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa;

		e. Pengawasan Manajemen Rumah Sakit; f. Audit kinerja; g. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; h. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; i. Audit investigasi j. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; k. <i>Certified Government Chief Audit Executive</i> (CGCAE); dan l. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
--	--	---

E. PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Dalam merencanakan prioritas obyek pemeriksaan Audit Operasional maupun Audit Kinerja digunakan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terdapat 2 variabel yang akan digunakan untuk menentukan Nilai Total Risiko (NTR) pada obyek pemeriksaan baik pada level program maupun level organisasi, yaitu :

1. Risiko Inheren (*inherent risk*), dengan bobot 40%

Risiko inheren mendasarkan pada register risiko setelah dievaluasi APIP. Hasil evaluasi APIP dikategorikan sesuai skala Risiko Inheren sebagai berikut :

No.	Interval Nilai Risiko/ NR	Skala Risiko
1.	1 s.d 5	Sangat Rendah
2.	6 s.d 10	Rendah
3.	11 s.d 15	Sedang
4.	16 s.d 20	Tinggi
5.	>21	Sangat Tinggi

2. Faktor Risiko dengan bobot 60%

Faktor Risiko yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan manajemen APIP meliputi :

- a. Porsi Anggaran Belanja Program dibandingkan dengan Total Anggaran Belanja Program/ PAB (bobot 25%);

- b. Sektor Unggulan/SU (bobot 25%);
- c. Potensi Fraud dan Kasus Hukum/ PFKH (bobot 20%);
- d. Isu terkini/IT (15%);
- e. Pertimbangan Manajemen Lainnya/PML (15%).

Nilai total Risiko (NTR) diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Risiko Intern (NRI) setelah dikalikan Bobot Risiko Intern (40%) dengan Nilai Faktor Risiko (NFR) setelah dikalikan Bobot Faktor Risiko (60%), dengan persamaan sebagai berikut :

$$NTR = (NRI \times 40\%) + (NFR \times 60\%)$$

$$NFR = (PAB \times 25\%) + (SU \times 25\%) + (PFKH \times 20\%) + (IT \times 15\%) + (PML \times 15\%)$$

Auditan ditentukan pada Nilai Total Risiko yang masuk kategori sangat tinggi dan/atau tinggi.

F. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

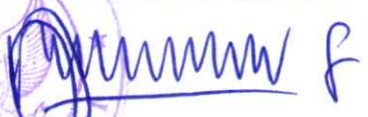
Kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Tebing Tinggi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 diampu oleh 3 Inspektur Pembantu di 3 Bidang inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam 2 Program, 4 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 yaitu sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Reviu Laporan Kinerja
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Pengawasan Desa
 6. Kerja Sama Pengawasan Internal
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasar Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 total anggaran berjumlah Rp 14.888.767.460,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp 11.288.829.460,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dianggarkan sebesar Rp 2.528.486.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dianggarkan sebesar Rp 1.071.452.000,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).


WALIKOTA TEBING TINGGI

IMAN IRDIAN SARAGIH

**TENTANG : PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKP2T)
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2025**

PETA PENGAWASAN REGULER TAHUN 2025
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA DAN INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tebing Tinggi, 28 Februari 2025
Walikota Tebing Tinggi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 100.3.3.3/331/2025
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025
TENTANG : PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKP2T)
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20
1	Penutupan Kas	Reviu	Pengawasan atas pengelolaan keuangan	Seluruh SKPD	Mg-I Jan 2025	Mg-II Jan 2025	1	0	1	1	4	7	6	6	55.800.000	6 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
2	Reviu Penerapan SPM TA. 2024	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa SPM disusun sesuai ketentuan	OPD Terkait	Mg-I Jan 2025	Mg-I Jan 2025	1	0	1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
3	Evaluasi Risk Register	Evaluasi	Untuk menilai sejauh mana SKPD mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko	Seluruh SKPD	Mg-III Jan 2025	Mg-IV Jan 2025	1	0	1	1	4	7	6	4	37.200.000	33 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
4	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Jan 2025	Mg-IV Jan 2025	1	0	1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
5	Pengawasan atas Penerapan SPM Pemadam Kebakaran Fokus Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Dinas Damkar dan Penyelamatan	Mg-I Feb 2025	Mg-III Feb 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
6	Pengawasan atas Penerapan SPM Urusan Bencana Fokus Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Daerah Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	BPBD	Mg-I Feb 2025	Mg-III Feb 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
7	Reviu Laporan Keuangan OPD	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Seluruh SKPD	Mg-I Feb 2025	Mg-II Feb 2025	1		1	1	4	7	6	2	18.600.000	2 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
8	Reviu Dana Hibah Bansos	PDTT	Peninjauan terhadap penggunaan dana hibah dan bansos	OPD Terkait	Mg-I Feb 2025	Mg-I Feb 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban 3
9	Reviu LkjiP	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan Kinerja Intansi Pemko Tebing Tinggi	Seluruh SKPD	Mg-II Feb 2025	Mg-II Feb 2025	1		1	1	4	7	6	5	46.500.000	33 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
10	Reviu LKPD	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Seluruh SKPD	Mg-III Feb 2025	Mg-IV Feb 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
11	Reviu LKPJ	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Seluruh SKPD	Mg-III Feb 2025	Mg-IV Feb 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
12	Reviu LPPD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercantum dalam rancangan LPPD	Pemko Tebing Tinggi	Mg-III Feb 2025	Mg-III Feb 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
13	Sasaran Pemda : Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidup	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1K	DP3APM, DINSOS	Mg-IV Feb 2025	Mg-II Mar 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
14	Sasaran Pemda : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1K	DISDIKBUD	Mg-IV Feb 2025	Mg-II Mar 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
15	Sasaran Pemda : Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1K	DINAS PUPR, DINAS PERHUBUNGAN	Mg-IV Feb 2025	Mg-II Mar 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
16	Sasaran Pemda : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1K	DINKES, DAN DINAS PPKB	Mg-IV Feb 2025	Mg-II Mar 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
17	Sasaran Pemda : Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1K	BPKPD, BAPPEDA, DISKOMINFO, INSPEKTORAT	Mg-IV Feb 2025	Mg-II Mar 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
18	Reviu Sirup	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa SIRUP disusun sesuai ketentuan	Seluruh SKPD	Mg-IV Feb 2025	Mg-IV Feb 2025	1		1	1	4	7	6	5	46.500.000	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
19	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Feb 2025	Mg-IV Feb 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
20	Evaluasi SPI	Evaluasi	Evaluasi SPI	OPD Terkait	Mg-IV Feb 2025	Mg-IV Feb 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Irban 3
21	Pengawasan atas Penerapan SPM Pemadam Kebakaran Fokus Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Dinas Damkar dan Penyelamatan	Mg-I Feb 2025	Mg-III Feb 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
22	Pengawasan atas Penerapan SPM Urusan Bencana Fokus Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Daerah Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	BPBD	Mg-I Feb 2025	Mg-III Feb 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
23	Reviu LKJIP	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan LKJIP	Seluruh SKPD	Mg-I Mar 2025	Mg-I Mar 2025	1		1	1	4	7	6	2	18.600.000	2 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
24	Reviu LKJIP Kota	Reviu	Memberikan Keyakinan terbatas atas Laporan LKJIP Kota Tebing Tinggi	Pemko Tebing Tinggi	Mg-II Mar 2025	Mg-II Mar 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
25	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Fokus Koperasi (Disperindag)	Pemeriksaan NSPK	Pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	Disperindag	Mg-III Mar 2025	Mg-I Apr 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
26	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Fokus Pariwisata (Disporapar)	Pemeriksaan NSPK	Pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	Disporapar	Mg-III Mar 2025	Mg-I Apr 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
27	Reviu Cascading	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Cascading berjalan sesuai ketentuan	OPD Terkait	Mg-III Mar 2025	Mg-III Mar 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
28	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Mar 2025	Mg-IV Mar 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
29	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi ZI TW I	Reviu	Meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor 90 Tahun 2021	Pemko Tebing Tinggi	Mg-IV Mar 2025	Mg-IV Mar 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
30	Reviu Pergeseran Anggaran	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Pergeseran Anggaran berjalan sesuai ketentuan	OPD Terkait	Mg-IV Mar 2025	Mg-IV Mar 2025	1		1	1	4	7	6	5	46.500.000	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
31	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Fokus Koperasi	Pengawasan	pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;	Disperindag	Mg-III Mar 2025	Mg-I Apr 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
32	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Fokus Pariwisata	Pengawasan	pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;	Disporapar	Mg-III Mar 2025	Mg-I Apr 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
33	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-I Apr 2025	Mg-I Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
34	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-I Apr 2025	Mg-I Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
35	Monitoring MCP TW I	Monitoring	Monitoring progress pemenuhan dokumen MCP	OPD Terkait	Mg-I Apr 2025	Mg-I Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
36	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi RB Tw I	Evaluasi	Untuk menilai sejauh mana SKPD memenuhi permintaan RB	Seluruh SKPD	Mg-II Apr 2025	Mg-II Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3
37	Evaluasi CPNS dan PPPK TA. 2024	Evaluasi	Untuk menilai pelaksanaan kegiatan Perekrutan PPPK	BKPSDM	Mg-II Apr 2025	Mg-II Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
38	Reviu Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa pokir berjalan sesuai ketentuan	Bappeda, Setwaan	Mg-II Apr 2025	Mg-II Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
39	Pengawasan atas Penerapan SPM Fokus Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Satpol PP	Mg-III Apr 2025	Mg-V Apr 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
40	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Dan Ibu Bersalin Tahun 2024 (Puskesmas Sri Padang)	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Puskesmas Sri Padang	Mg-III Apr 2025	Mg-V Apr 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
41	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-III Apr 2025	Mg-III Apr 2025	1		1	1	4	7	3	2	9.300.000	LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
42	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-V Apr 2025	Mg-V Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
43	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Evaluasi	Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan PUG di Kota Tebing Tinggi	Dinas PPKB	Mg-V Apr 2025	Mg-V Apr 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
44	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Rambutan	Mg-V Apr 2025	Mg-II Mei 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
45	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Mg-V Apr 2025	Mg-II Mei 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
46	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	Mg-V Apr 2025	Mg-II Mei 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
47	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Mg-V Apr 2025	Mg-II Mei 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
48	Pengawasan atas Penerapan SPM Fokus Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Satpol PP	Mg-III Apr 2025	Mg-V Apr 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
49	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Dan Ibu Bersalin Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Puskesmas Sri Padang	Mg-III Apr 2025	Mg-V Apr 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
50	Reviu RKPD dan Perubahan RKPD	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Seluruh SKPD	Mg-II Mei 2025	Mg-II Mei 2025	1		1	1	4	7	6	2	18.600.000	2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
51	Reviu Renja	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Renja disusun sesuai ketentuan	Seluruh SKPD	Mg-II Mei 2025	Mg-II Mei 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
52	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Mg-III Mei 2025	Mg-I Juni 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
53	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Mg-III Mei 2025	Mg-I Juni 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
54	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Bajenis	Mg-III Mei 2025	Mg-I Juni 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
55	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Sosial	Mg-III Mei 2025	Mg-I Juni 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
56	Reviu KUA-PPAS dan KUPA-PPAS	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Dokumen Perencanaan	Seluruh SKPD	Mg-III Mei 2025	Mg-III Mei 2025	1		1	1	4	7	6	2	18.600.000	2 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
57	Reviu RPJMD	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa RPJMD disusun sesuai ketentuan	Bappeda	Mg-IV Mei 2025	Mg-IV Mei 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
58	Kapabilitas APIP	Evaluasi	Agar terwujudnya pengawasn intern yang efektif	Inspektorat Kota	Mg-I Jun 2025	Mg-I Jun 2025	1		1	1	4	7	6	1		1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Sekretaris
59	Maturitas SPIP	Evaluasi	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP	Pemko Tebing Tinggi	Mg-I Jun 2025	Mg-I Jun 2025	1		1	1	4	7	6	3	27.900.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Irban 1
60	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Menilai SAKIP pada Seluruh SKPD	Inspektorat Kota	Mg-II Jun 2025	Mg-II Jun 2025	1		1	1	4	7	6	5	46.500.000	33 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
61	Reviu SSH	MCP	Memberikan keyakinan terbatas terhadap proses penyusunan, penetapan dan pemanfaatan SHS dalam penganggaran	BPKPD	Mg-II Jun 2025	Mg-II Jun 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
62	Reviu Tata Kelola (PBJ, PAD, BMD, Manajemen ASN, dan Perijinan)	MCP	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Mekanisme Administratif Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD Terkait	Mg-II Jun 2025	Mg-II Jun 2025	1		1	1	4	7	6	5	46.500.000	5 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
63	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mg-II Juni 2025	Mg-III Des 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
64	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	Mg-II Juni 2025	Mg-IV Juni 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
65	Reviu RKPD dan Perubahan RKPD	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Pemko Tebing Tinggi	Bappeda	Mg-III Jun 2025	Mg-III Jun 2025	1		1	1	4	7	6	2	18.600.000	2 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2

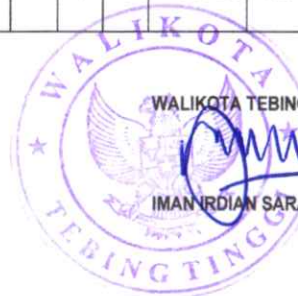
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
66	Reviu ASB dan HSPK	MCP	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen sesuai aturan, akurasi, keandalan dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen ASB dan HSPK	BPKPD	Mg-III Jun 2025	Mg-III Jun 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
67	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Jun 2025	Mg-IV Jun 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
68	Reviu Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana yang bersumber dari bantuan keuangan	BPKPD	Mg-IV Jun 2025	Mg-IV Jun 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
69	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi ZI TW II	Reviu	Meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor 90 Tahun 2021	Pemko Tebing Tinggi	Mg-I Jul 2025	Mg-I Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3
70	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-I Jul 2025	Mg-I Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
71	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-I Jul 2025	Mg-I Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
72	Reviu Renstra	Reviu	Menguji kesesuaian Renstra dengan RPJMD dan RPJMN	Seluruh SKPD	Mg-I Jul 2025	Mg-I Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
73	Monitoring MCP TW II	Monitoring	Monitoring progress pemenuhan dokumen MCP	OPD Terkait	Mg-I Jul 2025	Mg-I Jul 2025	1		1	1	4	7	1	1	1.550.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
74	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mg-I Juli 2025	Mg-III Juli 2025												Tinggi		Inspektoral Provinsi Sumatera Utara
75	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mg-I Juli 2025	Mg-III Juli 2025												Tinggi		Inspektoral Provinsi Sumatera Utara
76	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Mg-I Juli 2025	Mg-III Juli 2025												Tinggi		Inspektoral Provinsi Sumatera Utara
77	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Mg-I Juli 2025	Mg-III Juli 2025												Tinggi		Inspektoral Provinsi Sumatera Utara
78	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi RB Tw II	Evaluasi	Untuk menilai sejauh mana SKPD memenuhi permintaan RB	Seluruh SKPD	Mg-II Jul 2025	Mg-II Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3
79	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-II Jul 2025	Mg-II Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	2 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
80	Reviu HPS	MCP	Untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	BPKPD	Mg-II Jul 2025	Mg-II Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
81	Monitoring Inflasi	Monitoring	Monitoring Tim Inflasi Pemda	OPD Terkait	Mg-II Jul 2025	Mg-II Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
82	Pengawasan atas Penerapan SPM Pekerjaan Umum Fokus Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Dinas PUPR	Mg-III Juli 2025	Mg-V Juli 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
83	Pengawasan atas Penerapan SPM Perumahan Rakyat Fokus Penyediaan Rumah Layak Huni Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Dinas Perkimtah	Mg-III Juli 2025	Mg-V Juli 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
84	Pengawasan atas Penerapan SPM Pendidikan Fokus Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mg-III Juli 2025	Mg-V Juli 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
85	Reviu KUA-PPAS dan KUPA-PPAS	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan Dokumen Perencanaan	BPKPD	Mg-IV Jul 2025	Mg-IV Jul 2025	1		1	1	4	7	6	2	18.600.000	2 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
86	Probity Audit	MCP	Memberikan Keyakinan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, khususnya proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel	10 PROYEK STRATEGIS	Mg-IV Jul 2025	Mg-IV Jul 2025	1		1	1	4	7	6	6	55.800.000	6 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
87	Reviu RKBMD	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa RKBMD disusun sesuai ketentuan	Seluruh SKPD	Mg-IV Jul 2025	Mg-IV Jul 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
88	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-V Jul 2025	Mg-V Jul 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
89	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Mg-V Juli 2025	Mg-II Agustus 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
90	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Satuan Polisi Pamong Praja	Mg-V Juli 2025	Mg-II Agustus 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
91	Pengawasan atas Penerapan SPM Pekerjaan Umum Fokus Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Dinas PUPR	Mg-III Juli 2025	Mg-V Juli 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
92	Pengawasan atas Penerapan SPM Perumahan Rakyat Fokus Penyediaan Rumah Layak Huni Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Dinas Perkimtah	Mg-III Juli 2025	Mg-V Juli 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
93	Pengawasan atas Penerapan SPM Pendidikan Umum Fokus Pendidikan Kesenjangan Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Dinas Pendidikan	Mg-III Juli 2025	Mg-V Juli 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
94	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Hulu	Mg-I Agustus 2025	Mg-III Agustus 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
95	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Kecamatan Padang Hilir	Mg-I Agustus 2025	Mg-III Agustus 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
96	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Bidang Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja (Disnaker)	Pemeriksaan NSPK	Pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	Disnakerind	Mg-II Agu 2025	Mg-IV Agu 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
97	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Bidang Perhubungan Fokus Perparkiran (Dishub)	Pemeriksaan NSPK	Pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	Dinas Perhubungan	Mg-II Agu 2025	Mg-IV Agu 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
98	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-II Agus 2025	Mg-II Agus 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
99	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mg-III Agu 2025	Mg-I Sept 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
100	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Mg-III Agu 2025	Mg-I Sept 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
101	Pemeriksaan Dana Kelurahan	Pemeriksaan Dana Kelurahan	Menilai ketepatan lokasi penyaluran, kelengkapan syarat, waktu penyaluran, jumlah dana yang disalurkan dan ketepatan penggunaan dana kelurahan	SELURUH KELURAHAN	Mg-III Agu 2025	Mg-III Agu 2025	1		1	1	4	7	6	5	46.500.000	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Desa	Irban 2
102	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mg-IV Agu 2025	Mg-II Sept 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
120	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Agu 2025	Mg-IV Agu 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
121	Reviu RKA SKPD	Reviu	Memberi keyakinan terbatas terhadap informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD, dan informasi dalam RKA sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD	BPKPD	Mg-IV Agus 2025	Mg-IV Agus 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
122	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Bidang Tenaga Kerja Balai Latihan Kerja	Pengawasan	pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;	Disnaker	Mg-II Agus 2025	Mg-IV Agus 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
123	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Bidang Perhubungan Fokus Perparkiran	Pengawasan	pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;	Dishub	Mg-II Agus 2025	Mg-IV Agus 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
124	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Puskesmas Pabatu	Mg-I Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
125	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Puskesmas Rantau Laban	Mg-I Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
126	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Tahun 2024	Pemeriksaan SPM	Pelaksanaan pengawasan atas penerapan Standar Pelayanan Minimal	Puskesmas Satria	Mg-I Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
127	Reviu Perubahan RKA SKPD	Reviu	Memberi keyakinan terbatas terhadap informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD, dan informasi dalam RKA sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD	BPKPD	Mg-II Sept 2025	Mg-II Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
128	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan DAK Fisik Per Tahap	OPD Terkait	Mg-II Sept 2025	Mg-II Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
129	Reviu Pelayanan Publik	MCP	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan	OPD Terkait	Mg-III Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
130	Reviu Mutasi, Rotasi, dan Promosi	Reviu	Memastikan Mutasi, Rotasi, dan Promosi dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan	BKPSDM	Mg-III Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
131	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Sept 2025	Mg-IV Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
132	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi RB Tw III	Evaluasi	Untuk menilai sejauh mana SKPD memenuhi permintaan RB	Seluruh SKPD	Mg-IV Sept 2025	Mg-IV Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3
133	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Lingkungan Hidup	Mg-IV Sept 2025	Mg-II Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
134	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perhubungan	Mg-IV Sept 2025	Mg-II Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
135	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mg-IV Sept 2025	Mg-II Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
119	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mg-IV Sept 2025	Mg-II Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
120	Audit E-Purchasing	PDTT	mengidentifikasi potensi penyimpangan proses pengadaan	UK-PBJ	Mg-IV Sept 2025	Mg-IV Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban 3
121	Reviu TPG dan Tamsil	Reviu	Untuk Memvalidasi data pencairan TPG dan Tamsil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mg-IV Sept 2025	Mg-IV Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
122	Reviu Kinerja UKPBJ	Reviu	memastikan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, rencana, dan norma yang ditetapkan	UK-PBJ	Mg-IV Sept 2025	Mg-IV Sept 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
123	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Puskesmas Pabatu	Mg-I Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
124	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Puskesmas Rantau Laban	Mg-I Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
125	Pengawasan atas Penerapan SPM Kesehatan Fokus Ibu Hamil Tahun 2024	Pengawasan	pelaksanaan pengawasan atas penerapan standar pelayanan minimal;	Puskesmas Satria	Mg-I Sept 2025	Mg-III Sept 2025	1	1	1	1	3	7	15	1	20.000.000	1 LHP	Laptop, ATK		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
126	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi ZI TW III	Reviu	Meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor 90 Tahun 2021	Pemko Tebing Tinggi	Mg-I Okt 2025	Mg-I Okt 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3
127	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-I Okt 2025	Mg-I Okt 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
128	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-I Okt 2025	Mg-I Okt 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
129	Monitoring MCP TW III	Monitoring	Monitoring progress pemenuhan dokumen MCP	OPD Terkait	Mg-I Okt 2025	Mg-I Okt 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
130	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Mg-III Okt 2025	Mg-V Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
131	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Inspektorat Kota	Mg-III Okt 2025	Mg-V Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
132	Aspek Tupoksi, SDM, Keuangan, dan BMD	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku	Sekretariat DPRD	Mg-III Okt 2025	Mg-V Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Irban 2
133	Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	PDTT	Memberikan gambaran umum tentang kondisi teknologi informasi, memberikan penilaian hasil kinerja yang telah dilakukan oleh SKPD Pemko Tebing Tinggi dengan adanya teknologi informasi	Infrastruktur SPBE dan/atau Aplikasi khusus dan/atau keamanan infrastruktur SPBE dan/atau keamanan Aplikasi Khusus	Mg-IV Okt 2025	Mg-IV Okt 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban 3
134	Reviu DAU yang ditentukan penggunaannya	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas bahwa Dau yang ditentukan penggunaannya berjalan sesuai ketentuan	OPD Terkait	Mg-IV Okt 2025	Mg-IV Okt 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
135	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-V Okt 2025	Mg-V Okt 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
136	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Bidang Perijinan Fokus Perijinan Tenaga Kesehatan (DPMTSP)	Pemeriksaan NSPK	Pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	DPMTSP	Mg-I Nov 2025	Mg-III Nov 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	JLH	JLH HK	JLH TIM	Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Sub Kegiatan pada DPA	PPTK
137	Audit atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	PDTT	Menguji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD	OPD Terkait	Mg-III Nov 2025	Mg-III Nov 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban 3
138	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Nov 2025	Mg-IV Nov 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris
139	Reviu Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana yang bersumber dari bantuan keuangan	BPKPD	Mg-IV Nov 2025	Mg-IV Nov 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Keuangan	Irban 2
140	Pemeriksaan Dana BOS	PDTT	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan penggunaan Dana BOS telah dilaksanakan secara Efisien, Efektif dan Ekonomis	SELURUH INSTANSI PENDIDIKAN	Mg-IV Nov 2025	Mg-I Des 2025	1		1	1	4	7	6	5	46.500.000	5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Irban 3
141	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Urusan Arsip Daerah Fokus Penataan Arsip (Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah)	Pemeriksaan NSPK	Pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Mg-I Des 2025	Mg-III Des 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
142	Pengawasan atas Ketaatan NSPK dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan konkuren Urusan Kebersihan Fokus Pengolahan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	Pemeriksaan NSPK	Pengawasan atas ketaatan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren	Dinas Lingkungan Hidup	Mg-I Des 2025	Mg-III Des 2025	1	1	1	1	4	8	15	1	27.000.000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Irban 1
143	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi ZI TW IV	Reviu	Meyakini bahwa dokumen pelaksanaan RB telah sesuai dengan peraturan MenPAN Nomor 90 Tahun 2021	Pemko Tebing Tinggi	Mg-III Des 2025	Mg-III Des 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3
144	Reviu Penyerapan PBJ (Per Triwulan)	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa per Triwulan	UK-PBJ	Mg-III Des 2025	Mg-III Des 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
145	Reviu P3DN (Per Triwulan)	Reviu	Melaporkan progress penggunaan komponen dalam negeri sesuai Inpres No 2 Tahun 202	UK-PBJ	Mg-III Des 2025	Mg-III Des 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Reviu Laporan Kinerja	Irban 1
146	Monitoring MCP TW IV	Monitoring	Monitoring progress pemenuhan dokumen MCP	OPD Terkait	Mg-III Des 2025	Mg-III Des 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Irban 3
147	Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi RB Tw IV	Evaluasi	Untuk menilai sejauh mana SKPD memenuhi permintaan RB	Seluruh SKPD	Mg-III Des 2025	Mg-III Des 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Irban 3
148	Monitoring TLHP BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi	Monitoring	Monitoring Progres TLHP	OPD Terkait	Mg-IV Des 2025	Mg-IV Des 2025	1		1	1	4	7	6	1	9.300.000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Sekretaris



 WALIKOTA TEBING TINGGI



 IMANIRDIAN SARAGIH

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI****NOMOR :****TANGGAL :****TENTANG : PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
(PKP2T) BERBASIS RISIKO DI INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI****PROGRAM KERJA PEMBINAAN
INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025**

No	Area Pembinaan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal	Pelaksana
1	2	3	4	5	7	20
1	Pendampingan Dana BOS	Pendampingan	Pendampingan terhadap pengelolaan Dana BOS dan BOP	OPD Terkait	Mei	
2	Pendampingan Dana Kelurahan	Pendampingan	Pendampingan terhadap pengelolaan Dana Kelurahan	OPD Terkait	Juni	
3	Pendampingan SPIP	Pendampingan	Pendampingan terhadap pemenuhan dokumen SPIP	OPD Terkait	Mei	
4	Pendampingan MR	Pendampingan	Pendampingan terhadap penyusunan MR	OPD Terkait	April	
5	Sosialisasi Anti Korupsi pada Eksekutif	Pendampingan	Memberikan penyuluhan anti korupsi pada Eksekutif	OPD Terkait	Agustus	
6	Sosialisasi Anti Korupsi pada Legislatif	Pendampingan	Memberikan penyuluhan anti korupsi pada Legislatif	OPD Terkait	September	
7	Sosialisasi Anti Korupsi pada Masyarakat	Pendampingan	Memberikan penyuluhan anti korupsi pada Masyarakat	OPD Terkait	Oktober	
8	Pendampingan, Monitoring dan evaluasi BLUD Puskesmas	Pendampingan	Pendampingan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas	OPD Terkait	Oktober	
9	Pendampingan SAKIP	Pendampingan	Pendampingan terhadap penyusunan dokumen SAKIP	OPD Terkait	Maret	
10	Pendampingan Pendapatan Daerah	Pendampingan	Pendampingan terhadap pengelolaan PAD	OPD Terkait	Maret	
11	Pendampingan Pembinaan ASN	Pendampingan	Pendampingan terhadap pengelolaan pembinaan ASN	OPD Terkait	April	
12	Pendampingan Harmonisasi Hukum dan Kebijakan	Pendampingan	Pendampingan terhadap Harmonisasi hukum dan Kebijakan	OPD Terkait	April	
13	Pendampingan Keuangan dan PBJ	Pendampingan	Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan dan PBJ	OPD Terkait	Juli	

WALIKOTA TEBING TINGGI**IMAN Irdian Saragih**